

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Audit Report Lag*

Audit report lag adalah waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dan tanggal laporan audit. *Audit report lag* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini dalam laporan keuangan yang menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian proses audit. Menurut *internasional standard audit* atau (ISA) 5600 alinea 5, tanggal laporan audit adalah tanggal terakhir dari periode yang dicakup dalam laporan keuangan sedangkan tanggal laporan auditor adalah tanggal yang di butuhkan auditor pada laporannya atas laporan keuangan [22].

Menurut PSAK 1 (Revisi 2009) tentang “Penyajian Laporan Keuangan”, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia adalah suatu istilah teknis Akuntansi yang mencakup konversi aturan dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik Akuntansi yang berlaku umum di wilayah tertentu [23]. Tujuan adanya laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan, seperti investor, calon investor, kreditur, calon kreditur, karyawan, serta pihak lainnya dalam pengambilan suatu keputusan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat penting sebagai dasar untuk mengalokasikan dana-dana investasi secara efisien dan produktif [24].

Setelah auditor menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan audit, auditor harus memperhatikan sasaran audit dalam laporan keuangan yang akan diaudit. Ada tiga elemen di dalam sasaran audit yaitu [25]:

1. Kriteria (*criteria*), merupakan standar bagi setiap individu/ kelompok di dalam perusahaan ketika melakukan aktivitasnya
2. Penyebab (*cause*), merupakan tindakan (aktivitas) yang dilakukan oleh setiap individu/ kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif program berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih rendah dari standar yang telah di tetapkan

3. Akibat (*effect*), merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan program dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang di tetapkan.

Seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan harus mengikuti standar audit yang telah ditetapkan. Standar audit mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Indonesia pada tahun 2001 terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu [26].

1. Standar Umum

- a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor;
- b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor;
- c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya;
- b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan;
- c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- b) Laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan akuntansi dalam periode sebelumnya;

- c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor;
- d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diberikan.

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang sangat penting khususnya untuk perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan. Auditor memerlukan waktu yang cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten yang dapat mendukung opininya. Jika pada saat mengaudit laporan keuangan, sebelum menghasilkan suatu *audit report* (laporan audit) seorang auditor memerlukan rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Defenisi untuk keterlambatan di bagi menjadi tiga yaitu [27]:

1. *Preliminary lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan periode sebelumnya oleh pasar modal
2. *Auditors signature lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor
3. *Total lag*, yaitu interval antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahun publikasi oleh pasar modal

Adapun *audit report lag* dapat dirumuskan sebagai berikut [27]:

$$\text{Audit report lag} = \text{Tanggal Laporan Keuangan Perusahaan} - \text{Tanggal Laporan Auditor Independen} \quad (2.1)$$

2.1.2. *Audit Tenure*

Audit Tenure adalah lamanya waktu auditor secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan atau disebut juga lamanya masa perikatan audit antara klien dan auditor [20]. Perikatan audit merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang berpraktik melayani publik pada suatu kantor untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal yang material (atau disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material), sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, perikatan tersebut dilakukan berdasarkan standar audit. Hal ini mencakup audit berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya [28].

Seorang Akuntan yang berpraktik melayani publik harus mematuhi prinsip dasar etika dan independen pada saat melakukan perikatan audit. Independensi berkaitan dengan prinsip objektivitas dan integritas. Independensi mencakup [28]:

1. Independensi dalam pemikiran – sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat menyetujui pertimbangan professional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme professional.
2. Independensi dalam penampilan – penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme professional dari kantor atau seorang anggota tim audit telah disepakati.

Klien audit merupakan entitas yang melakukan perikatan audit dengan kantor. Ketika klien adalah entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya. Namun, ketika klien audit bukan entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh klien. Pada saat tim audit mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien dengan evaluasi independensi kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas berelasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi [28].

Independensi yang ada pada seorang akuntan publik ataupun auditor harus dipertahankan selama periode perikatan dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Periode perikatan dimulai ketika tim audit melakukan audit. Periode berakhir ketika laporan audit diterbitkan. Ketika perikatan bersifat berulang, maka periode perikatan berakhir ketika terdapat pemberitahuan dari salah satu pihak bahwa hubungan professional telah berakhir atau laporan audit telah diterbitkan [28].

Ketika seorang individu dalam perikatan audit selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat muncul. Ancaman kedekatan dapat muncul sebagai akibat dari hubungan yang lama sebagai anggota tim audit dengan [28]:

1. Klien audit dan operasinya;
2. Manajemen senior klien audit; atau
3. Laporan keuangan atas opini audit yang akan diberikan oleh KAP atau informasi keuangan yang menjadi basis laporan keuangan.

Ancaman kepentingan pribadi dapat muncul sebagai akibat dari kekhawatiran individu akan kehilangan klien lama atau kepentingan dalam mempertahankan hubungan pribadi yang erat dengan anggota manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ancaman seperti itu mungkin memengaruhi pertimbangan individu tersebut secara tidak tepat. Faktor yang relevan untuk mengevaluasi level ancaman kedekatan atau ancaman kepentingan pribadi termasuk:

a. Sehubungan dengan individu tersebut [28]:

1. Lamanya hubungan individu tersebut dengan klien, termasuk jika hubungan terjadi pada saat individu tersebut berada di kantor sebelumnya.
2. Berapa lama individu tersebut telah menjadi anggota tim perikatan dan sifat dari peran yang dilakukan.
3. Sejauh mana pekerjaan individu tersebut diarahkan, ditelaah, dan diawasi oleh personel yang lebih senior.
4. Sejauh mana individu tersebut, karena senioritas dari individu tersebut, memiliki kemampuan untuk memengaruhi hasil audit, misalnya dengan membuat keputusan penting atau mengarahkan pekerjaan anggota tim perikatan lainnya.
5. Kedekatan hubungan pribadi individu tersebut dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
6. Sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi antara individu tersebut dan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

b. Sehubungan dengan klien audit:

1. Sifat atau kompleksitas isu akuntansi dan pelaporan keuangan klien dan apakah hal tersebut telah berubah.

2. Apakah terdapat perubahan dalam manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
3. Apakah terdapat perubahan struktural dalam organisasi klien yang memengaruhi sifat, frekuensi, dan luasnya interaksi yang mungkin dimiliki individu dengan manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

Aturan mengenai masa perikatan audit pada awalnya diatur dalam Keputusan Peraturan Menteri Keuangan tanggal 30 September 2002, menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama adalah 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut [29]. Pada tahun 2008 terjadi perubahan mengenai pemberian jasa audit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 5 Februari 2008 menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP paling lama adalah 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien serta jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut [30].

Kemudian tahun 2015 pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai masa perikatan audit yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Setelah 5 (lima) tahun memberikan jasa audit, Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut [31].

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam Pasal 16 ayat (1) dijelaskan bahwa pihak yang

melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis selama 3 (tiga) tahun, pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit dari AP setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak menggunakan jasa audit dari AP yang sama (*cooling-off period*) [32]. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur *audit tenure* sebagai berikut [27].

Audit Tenure = Masa perikatan audit antara Auditor dan Perusahaan (2.2)

2.1.3. Ukuran KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi yang telah mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa audit profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangan memutuskan untuk berinvestasi, para investor akan lebih mempertimbangkan kualitas audit dari suatu laporan keuangan yang diaudit oleh KAP dengan ukuran yang besar dan memiliki reputasi yang baik. KAP besar akan lebih cenderung membutuhkan waktu yang lebih cepat ketika melakukan proses audit, karena KAP besar akan mempertahankan eksistensi, dan fleksibilitas yang tinggi untuk mempertahankan nama baik KAP nya [20]. Adapun tugas dan tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan [33]:

1. Disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material
2. Disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum

Pemilihan auditor oleh klien dipengaruhi oleh preferensi risiko klien atas keterungkapan dirinya kepada publik. Perusahaan berekspektasi bahwa publik akan menganggap perusahaan yang bersedia diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar yang berarti memiliki sumber daya yang lebih besar adalah perusahaan yang lebih menguntungkan. Hal sebaliknya terjadi pada perusahaan yang memilih diaudit oleh KAP yang lebih kecil. Auditor yang berhadapan dengan klien yang berisiko jika harus menerimanya, akan memberikan *fee* yang lebih tinggi dan meningkatkan jam audit agar bisa meningkatkan kekauatan yang berisiko tinggi, KAP besar cenderung lebih berhati-hati karena biaya litigasi potensial mereka lebih besar dari pada biaya potensial KAP yang lebih kecil. Hal yang sama akan dilakukan

jika KAP menerima klien baru, audit atas klien baru memiliki risiko kekeliruan (*failure*) yang lebih tinggi dibandingkan audit atas klien lama yang telah dikenal auditor. Auditor sensitif terhadap faktor risiko klien, KAP besar lebih suka menghindari klien berisiko tinggi untuk menghindari atau mengurangi risiko litigasi. KAP besar yang bisa menerima risiko tersebut dengan menerapkan kebijakan pemantauan yang lebih ketat. KAP yang lebih kecil akan lebih cenderung bersedia mengaudit klien yang berisiko [26].

Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia sebagian besar di audit Kantor Akuntan Publik (KAP) besar, yang berafiliasi dengan *the big four*. KAP yang berafiliasi dengan *the big four* dianggap lebih memahami peraturan dipasar modal, dibandingkan dengan KAP kecil. *The big four* adalah empat firma jasa profesional terbesar diseluruh dunia. Yang menawarkan jasa asurans, jasa audit, jasa akuntansi, perpajakan, konsultasi manajemen advisori, aktuarial dan keuangan korporasi (*corporate finance*). Empat KAP lokal yang berafiliasi dengan *the big four* yaitu [24]:

- a) KAP Satrio Bing Eny & Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu
- b) KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan PriceWaterhouse Coopers (PWC)
- c) KAP Purwantono, Suherman & Surja berafiliasi dengan Erns & Young (EY)
- d) KAP Siddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG).

Kondisi yang dapat mempengaruhi pemberian pendapat atau opini oleh KAP adalah [33]:

1. Ruang lingkup audit yang dibatasi, yaitu pembatasan yang dilakukan oleh klien, misalnya auditor tidak diperbolehkan melakukan konfirmasi utang piutang atau terdapat keadaan diluar kekuasaan auditor maupun klien sehingga membatasi ruang lingkup pelaksanaan audit. Contohnya tidak dapat menjangkau pemeriksaan fisik karena terjadi hal yang tidak terduga seperti bencana alam, kebakaran pada tempat tertentu yang di miliki klien.
2. Laporan keuangan yang diperiksa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, dalam hal ini klien tidak bersedia mengganti prinsip akuntansinya agar

laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di negara tersebut.

3. Prinsip akuntansi dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten, bila perusahaan melakukan perubahan prinsip akuntansi untuk maksud dan tujuan tertentu, maka akan mengabaikan prinsip konsistensi.
4. Ada beberapa ketidakpastian material yang mempengaruhi laporan keuangan, tidak dapat diperkirakan kelanjutannya pada saat laporan audit dibuat.
5. Auditor tidak independen, auditor yang tidak independen tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian

Indikator yang digunakan dalam ukuran KAP adalah kelompok *the big four* dan *non the big four*. Ukuran KAP diukur dengan menggunakan variabel dummy, dengan memberikan kode 1 pada KAP *the big four* dan 0 pada KAP *non the big four* sebagai berikut [26]:

2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko antara usaha perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aset. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aset perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan [19].

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, tentang UMKM (Usahan Mikro, Kecil, Menengah) dijelaskan bahwa pemerintah sangat mendorong terciptanya usaha-usaha yang ada di masyarakat. Usaha-usaha yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan kedalam empat kategori, yang akan dijabarkan definisi dan karakteristik dari berbagai usaha dilihat dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2008 sebagai berikut [34].

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan usaha mikro paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
4. Usaha Besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara, swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kekayaan besar usaha ini melebihi usaha menengah yaitu lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan melebihi Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Perusahaan yang memiliki ukuran besar dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran kecil. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai dan lebih berpengalaman sehingga dapat meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan dalam kegiatan operasional menjadi lebih baik dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran kecil [20]. Selain itu, perusahaan besar juga mempunyai biaya informasi yang rendah, mempunyai kompleksitas dan dasar kepemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil [19].

Ukuran Perusahaan (*size*) merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan [19]. Pengukuran *size* biasanya adalah total aset perusahaan. Aset suatu perusahaan biasanya mempunyai nilai yang besar, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan yang akan terjadi maka diperlukan untuk mengecilkan nilai aset. Secara umum pengukuran *size* menggunakan Logaritme (log) atau Logaritme Natural aset [35]. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut [19].

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)} \quad (2.3)$$

2.1.5. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit diketuai oleh komisaris independen yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan yang berkaitan dengan *review system* pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektifitas audit [20].

Menurut *Sarbanes Oxley Act*, Komite Audit merupakan sebuah komite (atau badan yang setingkat) yang didirikan oleh dan terdiri atas *Board of Directors* dengan tujuan mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan dan audit atas laporan keuangan perusahaan. Apabila komite ini belum dibentuk maka *Board of Directors* secara keseluruhan dianggap sebagai Komite Audit [36].

Komite Audit di perusahaan publik memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi *good corporate governance*. Untuk mewujudkan prinsip *good corporate governance* di suatu perusahaan publik, diharapkan prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) menjadi landasan utama dalam aktivitas komite. Kehadiran komite audit telah mendapat respon yang cukup positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bursa Efek Indonesia (BEI), para investor, profesi penasehat hukum (advokat), profesi akuntan serta perusahaan penilai independen (*independent appraisal company*) [36].

Menurut peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris [37].

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi [37] :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain pelaporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pertunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut [37] :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Salah satu tanggung jawab komite audit adalah menilai (*review*) hasil laporan audit dari *external auditor*. Kedudukan komite audit yang merupakan salah satu komite untuk membantu dewan komisaris dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Menurut Tunggal Mekanisme Kerja Komite Audit dengan Auditor Eksternal antara lain [36]:

1. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan *Term of Reference* (TOR) dan penunjukan Auditor Eksternal dan kepantasan *audit fee*.
2. Komite Audit melaksanakan penelaahan cakupan perencanaan audit dari Auditor Eksternal dan memantau pelaksanaannya.
3. Komite Audit melakukan penelaahan tahunan kinerja dan independensi dari Auditor Eksternal.

Komite audit juga perlu menelaah hasil pekerjaan dari internal auditor. Komite audit dapat mempengaruhi dan membantu pihak manajemen dalam

penunjukkan auditor dari kantor akuntan publik. Komite audit haruslah orang yang kompeten dan memiliki kinerja yang berkualitas, oleh karena itu anggota dari komite audit sekurang-kurangnya haruslah ada yang memiliki latar belakang akuntansi dan memiliki pengalaman di bidang audit, sehingga memiliki pemahaman tentang isu-isu terkini mengenai permasalahan akuntansi. Dengan demikian perlu adanya kerja sama yang baik antara komite audit dengan internal auditor dalam mewujudkan kondisi yang *good corporate governance* tersebut [36]. Komite Audit dapat dirumuskan sebagai berikut [37] :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit} \quad (2.4)$$

2.1.6. *Leverage*

Dalam menjalankan usaha, setiap perusahaan membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Dana ini dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaan serta untuk membiayai aktivitas investasi perusahaan, seperti biaya untuk mengganti atau membeli tambahan peralatan dan mesin produksi yang baru, membuka kantor cabang baru, melakukan ekspansi bisnis, dan sebagainya [21].

Dalam memperoleh sumber dana untuk kepentingan pembiayaan, pada umumnya perusahaan melakukan pinjaman dengan berutang kepada kreditor atau modal sendiri. Dengan melakukan kedua hal tersebut, penting bagi manajer keuangan untuk menyiasati kebutuhan dana perusahaan dengan cara melakukan kombinasi sumber pembiayaan antara pinjaman dan modal sendiri. Besarnya penggunaan dana untuk masing-masing sumber pembiayaan haruslah dipertimbangkan secara cermat agar tidak membebani perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kemampuan, tujuan, dan strategi perusahaan. Kombinasi penggunaan dana ini dapat ditunjukkan lewat rasio *leverage* [21].

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan asetnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar

seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) [38].

Penggunaan rasio *leverage* bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut *Fred Weston*, rasio *leverage* memiliki beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar [38].

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi (memiliki utang besar) dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi. Risiko keuangan yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang rendah memiliki risiko keuangan yang kecil, tetapi juga mungkin memiliki peluang yang kecil untuk menghasilkan laba yang besar. Maka dari itu, seorang manajer keuangan dituntut untuk memiliki keandalan dalam mengelola tingkat *leverage* perusahaan, khususnya dalam mencermati hubungan antara risiko keuangan dengan tingkat pengembalian yang dihasilkan dari dana yang dipinjam perusahaan [21].

Penghitungan rasio *leverage* dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan neraca, yaitu mengukur rasio *leverage* dengan menggunakan pos-pos yang ada di neraca. Pendekatan ini menghasilkan rasio *leverage* yang terdiri atas: rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*), rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*), dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas (*Long Term Debt to Equity Ratio*).
2. Pendekatan laporan laba rugi, yaitu mengukur rasio *leverage* dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Contoh rasio *leverage* berdasarkan

pendekatan ini adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga (*Times Interest Earned Ratio*).

3. Pendekatan laporan laba rugi dan neraca, yaitu mengukur rasio *leverage* dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi maupun neraca. Contoh rasio *leverage* berdasarkan pendekatan campuran ini adalah rasio laba operasional terhadap kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*) [21].

Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio *leverage* secara keseluruhan:

1. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
2. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
3. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
6. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan asset perusahaan.
7. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan asset perusahaan.
8. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditor.
9. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.
10. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.
11. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
12. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
13. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio *leverage* antara lain: *debt to asset ratio (debt ratio)*, *debt to equity ratio*, *long term debt to equity ratio*, *tangible assets debt coverage*, *current liabilities to net work*, *times interest earned*, dan *fixed charge coverage* [38]. Rasio *leverage* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*. *Debt Ratio* merupakan rasio perbandingan antara total utang (utang lancar dan utang jangka panjang) dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aset perusahaan dibiayai oleh utang [39].

Debt Ratio seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan sejauh mana dana yang dipinjam telah digunakan untuk membeli aset. Semakin tinggi *debt ratio* suatu perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tidak dapat memperoleh tambahan pinjaman dari kreditur karena dikhawatirkan jika perusahaan tidak mampu melunasi seluruh utang dengan total aset yang dimiliki. Sebaliknya, semakin rendah *debt ratio* suatu perusahaan menunjukkan bahwa sedikitnya aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (dengan kata lain bahwa sebagian besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh modal). Ketentuan umumnya adalah bahwa perusahaan seharusnya memiliki *debt ratio* kurang dari 0,5 namun ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri [21]. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *leverage* sebagai berikut [39]:

$$\text{Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \quad (2.5)$$

2.1.7. Kualitas Audit

Menurut Institusi Akuntan Publik Indonesia *auditing* adalah pemeriksaan yang dilakukan secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Sebagai sebuah profesi, auditor bertugas untuk memberikan jaminan apakah laporan keuangan yang dibuat manajemen telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kualitas audit merupakan konsep yang menunjukkan bahwa auditor dapat

melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan etika profesi, kompetensi dan independensi. Kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinannya dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/ intentionel error* dari laporan keuangan perusahaan dan seberapa besar kemungkinannya temuan tersebut dilaporkan dan dicantumkan dalam opini auditnya [40].

Adapun jenis-jenis opini akuntan publik yaitu:

1. Wajar tanpa pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam SA 411 paragraf empat bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia didasarkan atas pertimbangan apakah:

- a) Prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum di Indonesia
- b) Prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan
- c) Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman dan penafsiran
- d) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklarifikasi dan diikhtisarkan dengan semestinya, yang tidak terlalu rinci atau tidak terlalu ringkas
- e) Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasari dalam suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas dalam batas-batas yang dapat diterima, yaitu batas-batas yang layak dan praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan.

2. Wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas

Pendapat ini diberikan oleh akuntan publik apabila pelaksanaan audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan. Dalam SPAP seksi 508 paragraf

11 menjelaskan kondisi yang memerlukan bahasa penjas tambahan, antara lain:

- a) Pendapat auditor Sebagian didasarkan atas laoran auditor independent lain
- b) Untuk mencegah laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimoang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
- c) Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempeertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai
- d) Diantara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya
- e) Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif
- f) Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-*riview*
- g) Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihiangkan, yang penyajiannya menyimoang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut dan auditor tidak dapat melengkapi prosedut audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut
- h) Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

3. Wajar dengan pengecualian

Sesuai dengan SA 508 paragraf 20 dijelaskan bahwa pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila:

- a) Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan
- b) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraph terpisah sebelum paragraf pendapat, auditor juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraph penjelasan didalam paragraph pendapat (SA 508 paragraf 21).

4. Pendapat tidak wajar

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya mengenai:

- a) Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar
- b) Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan (SA 508 paragraf 59)

5. Tidak memberikan pendapat

Pernyataan ini dapat diberikan auditor jika auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Biasanya pernyataan tidak memberikan pendapat, dikeluarkan oleh auditor apabila terdapat pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu, atau auditor dalam melaksanakan pemeriksaan tidak independent terhadap klien.

Skandal akuntansi yang marak terjadi akhir-akhir ini, berakibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan kualitas audit yang dihasilkan.

Terdapat hubungan erat antara waktu penyampaian laporan keuangan dengan kualitas pelaksanaan general audit oleh auditor independen. Pendeknya waktu penyampaian laporan akan memberikan peluang terjadinya:

- b. Penyelesaian *disagreement* temuan audit melalui negoisasi yang dipaksakan antara pihak *auditee* (emiten) dengan auditor independen, sehingga hal ini memungkinkan dinomorduakan faktor kualitas audit dibandingkan dengan faktor lainnya.
- c. Apabila faktor kualitas audit dinomorduakan, maka sudah pasti dapat dipastikan bahwa independensi auditor mengalami degradasi [26].

Opini audit sebagai produk yang akan digunakan oleh *stakeholder* untuk pengambilan keputusan pada dasarnya adalah untuk menilai pengaruh kepuasan auditor (akuntan publik) maupun implementasi audit independen atas laporan keuangan dan bagaimana implikasinya terhadap kualitas audit yang dijalankan para praktisi [26].

Satu hal yang menjadi permasalahan dalam menentukan bagaimana menilai kualitas audit, karena hasil dari kualitas audit tidak bisa langsung diamati dan kualitas audit mempunyai arti yang berdeda-beda antara setiap individu. Sehubungan dengan kualitas audit yang tidak bisa diamati secara langsung maka peneliti mencari indikator pengganti terhadap kualitas audit menggunakan pengukuran *discretionary accruals*.

Discretionary accruals merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan (*discretion*) manajerial, sementara *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang tidak dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Total akrual dipecah menjadi empat komponen utama akrual, yaitu *discretionary current accruals*, *discretionary long-term accruals*, *nondiscretionary current accruals* dan *nondiscretionary long-term accruals*. *Discretionary current accruals* dan *discretionary long-term accruals* merupakan akrual yang berasal dari aktiva lancar (*current assets*), sedangkan *nondiscretionary current accruals* dan *nondiscretionary long-term accruals* merupakan akrual yang berasal dari aktiva tidak lancar (*fixed assets*) [41]. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kualitas audit menggunakan pengukuran *discretionary accruals* sebagai berikut [41]:

$$\frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{i,t-1}} \right) + \alpha_4 \left(\frac{\Delta CF_{it}}{TA_{it-1}} \right) + |\epsilon_{it}|$$

$$NDA_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{TA_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{TA_{i,t-1}} \right) + \alpha_4 \left(\frac{\Delta CF_{it}}{TA_{it-1}} \right)$$

$$|DA_{it}| = \frac{TACC_{it}}{TA_{it-1}} - NDA_{it} \quad (2.7)$$

Keterangan

NDA_{it}	= <i>Non discretionary accruals</i>
$TACC_{it}$	= Total akrual pada periode t ($TACC_{it} = net\ income - cash\ flow\ from\ operation$)
α	= Konstanta
TA_{it-1}	= Total aset pada awal tahun t
ΔREV_{it}	= Perubahan pendapatan antara tahun t dan t-1
ΔREC_{it}	= Perubahan piutang antara tahun t dan t-1
PPE_{it}	= Aset tetap bruto tahun t
ΔCF_{it}	= Perubahan <i>cash flow operation</i> antara tahun t dan t-1
$ \epsilon_{it} $	= <i>Absolut discretionary accruals</i>

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Adapun review dari peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Audy Nur Affifah dan Endah Susilowati melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh *Audit Tenure* dan Ukuran KAP Terhadap *Audit Report Lag* (ARL) dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dengan total sampel yaitu 85 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit report lag*, variabel independen yang digunakan adalah *audit tenure* dan ukuran KAP, serta variabel intervening yang digunakan adalah kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan *audit tenure* dan ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan *audit tenure* dan ukuran KAP tidak

berpengaruh terhadap *audit report lag*. Secara parsial menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. *Audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Serta *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit sebagai variabel intervening dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit sebagai variabel intervening [7].

2. Florian Wulandari dan Hadi Irwanto Handojo melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 dengan total sampel 190 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah ukuran KAP, *leverage*, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan umur perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan ukuran KAP, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit [12].
3. I Gede Aditya Cahya Gunarsa dan IGAM Asri Dwija Putri melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Independensi Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap *Audit Report Lag* di Perusahaan Manufaktur”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015, dengan total sampel yaitu 87 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit report lag*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah komite audit, independensi komite audit, dan profitabilitas. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa komite audit, independensi komite audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan secara parsial, komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* [16].

4. Komar Darya dan Swasti Ayu Puspitasari melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Reputasi KAP, *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 dengan total sampel 19 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah reputasi KAP, *audit tenure*, dan ukuran perusahaan klien. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan reputasi KAP, *audit tenure*, ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara parsial menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan ukuran perusahaan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit [11].
5. Muhammad Faisal melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP), *Tenure Audit* dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016 dengan total sampel 51 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah rotasi kantor akuntan publik (KAP), *tenure audit* dan ukuran KAP. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial menunjukkan bahwa rotasi kantor akuntan publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, *tenure audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit [9].
6. Nada Pertiwi dan Erinos NR melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Kualitas Komite Audit, *Workload*, dan Rotasi Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan total sampel 107 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kualitas komite audit, *workload*, dan rotasi auditor. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan kualitas komite audit, *workload*, dan rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara parsial menunjukkan bahwa kualitas

komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, workload auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, dan rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit [14].

7. Ni Made Sunarsih, Ida Ayu Budhananda, dan Ni Kadek Mirah Masdiari melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit, Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan total sampel yaitu 123 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit report lag*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas audit, opini audit, dan komite audit. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), kualitas audit, opini audit, dan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, solvabilitas (DER) berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* [13].
8. Nisha Marina, Nia Ramadhani, dan Muhammad Ridha Habibi Z. melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018”, dengan total sampel yaitu 189 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit report lag*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan secara parsial, ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* [10].

9. Sarah Nuriela Sabatin, Mekani Vestari melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Nilai Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2017 dengan total sampel 324 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit report lag*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Nilai Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan *Audit Tenure*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan nilai persediaan, aset tetap, ukuran perusahaan, kualitas audit dan *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Secara parsial menunjukkan bahwa aset tetap berpengaruh positif terhadap *audit report lag* dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit report lag*, nilai perusahaan, kualitas audit dan *audit tenure* tidak memberikan pengaruh terhadap *audit report lag* [8].
10. Sarifah Vesselina Ardani melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh *Tenure Audit*, Rotasi Audit, *Audit Fee* Terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 dengan total sampel 33 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit, variabel independen yang digunakan adalah *audit tenure*, rotasi audit, dan *auditfee*, serta variabel moderasi yang digunakan adalah komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Secara moderasi, komite audit tidak mampu memoderasi hubungan antara *audit tenure*, rotasi audit, dan *audit fee* terhadap kualitas audit [6].
11. Sudrajat, Jouzar Farouq Ishak, Mia Sukmawati, Mutiara Nuru Syifa melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “*The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, Firm Reputation and Institutional Ownership on Audit Report Lag*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Variabel dependen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *audit report lag*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *Profitability, Leverage, Firm Size, Firm Reputation and Institutional Ownership*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial menunjukkan bahwa *profitability (ROI) has no negative effect on audit report lag, leverage (DAR) does not have a negative effect on audit report lag, firm size has a negative effect on audit report lag, public accounting firm (KAP) reputation has no negative influence on audit report lag and institutional ownership does not have a negative effect on audit report lag* [18].

12. Widiyaya, Sriyana Romitha melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 dengan total sampel 416 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Konsentrasi kepemilikan, Kepemilikan direktur, Ukuran dewan, Dewan direksi independen, komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial menunjukkan bahwa Konsentrasi kepemilikan, Ukuran dewan, Dewan direksi independen dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas audit. *Leverage, Komite audit dan Kepemilikan direktur tidak berpengaruh terhadap kualitas audit* [15].
13. Yansen Cristian Halim melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Report Lag*”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 dengan total sampel 68 perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit report lag*, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, *board size, leverage*, ukuran perusahaan, dan *ownership concentration*. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan profitabilitas, *board size, leverage*, ukuran perusahaan, dan *ownership concentration* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksi dengan *Return on Asset (ROA)* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag, board size* yang diproksi dengan total jumlah personel dalam dewan komisaris yang ditambah dengan jumlah

dewan direksi dalam suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, *leverage* yang diproksi dengan *debt to total asset ratio* (DAR) berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, ukuran perusahaan yang diproksi dengan total aset berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, *ownership concentration* yang diproksi dengan jumlah pemegang saham mayoritas yang memegang lima persen atau lebih saham dari suatu perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *audit report lag* [17].

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Audy Nur Affifah dan Endah Susilowati (2021) [7].	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> dan Ukuran KAP Terhadap <i>Audit Report Lag</i> (ARL) dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Intervening	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit Report Lag</i> (ARL). <u>Variabel Intervening:</u> Kualitas Audit <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Audit Tenure</i> 2. Ukuran KAP	<u>Secara Simultan:</u> 1. <i>Audit tenure</i> dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit 2. <i>Audit tenure</i> dan Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> . <u>Secara Parsial:</u> 1. <i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 2. Ukuran KAP berpengaruh negative
Florian Wulandari dan Hadi Irwanto Handojo (2017) [12].	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur	<u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Audit <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran KAP 2. <i>Leverage</i> 3. Pertumbuhan Perusahaan 4. Ukuran Perusahaan 5. Kepemilikan Institusional 6. Kepemilikan Manajerial 7. Umur Perusahaan	<u>Secara Parsial:</u> 1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. 2. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 3. Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 4. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 5. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 6. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 7. Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
I Gede Aditya	Pengaruh Komite Audit, Independensi	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit Report Lag</i>	<u>Secara Simultan:</u> Komite Audit, Independensi

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Cahya Gunarsa dan Asri Dwija Putri (2017) [16].	Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap <i>Audit Report Lag</i> di Perusahaan Manufaktur	(ARL) <u>Variabel Independen:</u> 1. Komite Audit 2. Independensi Komite Audit 3. Profitabilitas	Komite Audit, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> . <u>Secara Parsial:</u> 1. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 2. Independensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> .
Komar Darya dan Ayu Puspitasari (2017) [11].	Pengaruh Reputasi <i>Audit Tenure</i> , Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit	<u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Audit <u>Variabel Independen:</u> 1. Reputasi KAP 2. <i>Audit Tenure</i> 3. Ukuran Perusahaan Klien	<u>Secara Simultan:</u> Reputasi KAP, <i>audit tenure</i> , ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap kualitas audit. <u>Secara Parsial:</u> 1. <i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. 2. Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. 3. Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
Muhammad Faisal (2019) [9].	Pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP), <i>Tenure Audit</i> dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit	<u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Audit <u>Variabel Independen:</u> 1. Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 2. <i>Audit Tenure</i> 3. Ukuran KAP	<u>Secara Parsial:</u> 1. Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. 2. Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 3. <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
Nada Pertiwi dan Erinor NR (2020) [14].	Pengaruh Kualitas Komite Audit, <i>Workload</i> , dan Rotasi Auditor Terhadap Kualitas Audit	<u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Audit <u>Variabel Independen:</u> 1. Kualitas Komite Audit 2. <i>Workload</i> 3. Rotasi Auditor	<u>Secara Simultan:</u> Kualitas komite audit, <i>workload</i> , dan rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. <u>Secara Parsial:</u> 1. Kualitas Komite Audit berpengaruh positif

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
			terhadap Kualitas Audit. 2. <i>Workload</i> berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit. 3. Rotasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
Ni Made Sunarsih, Ida Ayu Budhananda, dan Ni Kadek Mirah Masdiari (2021) [13].	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit, Komite Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit Report Lag</i> (ARL) <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas (ROA) 3. Solvabilitas (DER) 4. Kualitas Audit 5. Opini Audit 6. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas (ROA), Solvabilitas (DER), Kualitas Audit, Opini Audit, dan Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> . <u>Secara Parsial:</u> 1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 2. Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 3. Solvabilitas (DER) berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 4. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 5. Opini Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 6. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> .
Nisha Marina, Nia Ramadhani, Muhammad Ridha Habibi Z. (2021) [10].	Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan Terhadap <i>Audit Report Lag</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit Report Lag</i> <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran KAP 2. Ukuran Perusahaan 3. Umur Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Ukuran KAP, ukuran perusahaan dan Umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . <u>Secara Parsial:</u> 1. Umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . 2. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> . 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>audit</i>

Lanjutan Tabel 2.1

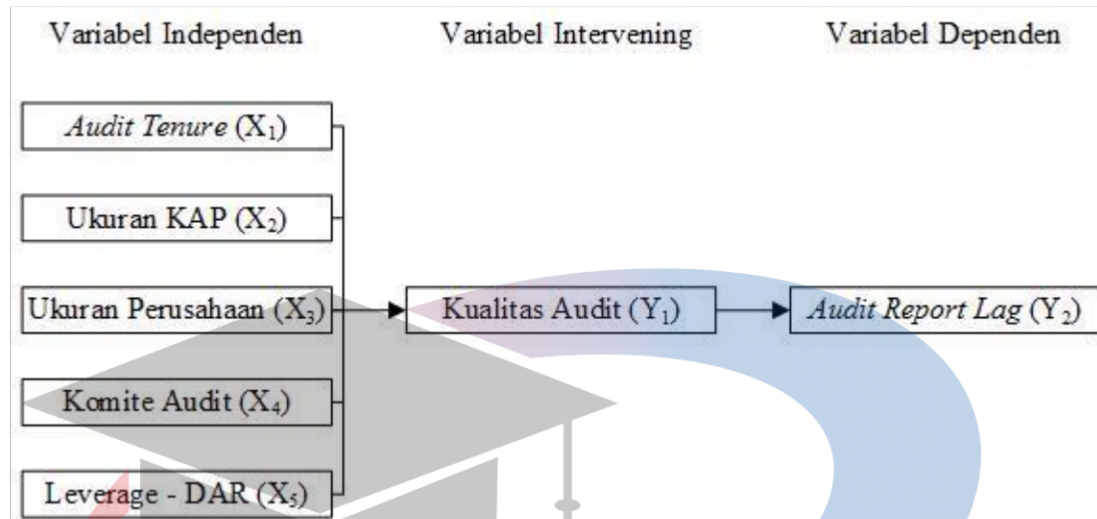
Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Sarah Nuriela Sabatin, Mekani Vestari (2019) [8].	Nilai Perusahaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan <i>Audit Tenure</i> terhadap <i>Audit Report Lag</i>	<p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit Report Lag</i> (ARL)</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Persediaan 2. Aset Tetap 3. Ukuran Perusahaan 4. Kualitas Audit 5. <i>Audit Tenure</i> 	<p><u>Secara Simultan:</u> Nilai persediaan, Aset tetap, ukuran perusahaan, kualitas audit dan <i>audit tenur</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>.</p> <p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Tetap berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i>. 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i>. 3. Nilai Persediaan tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>. 4. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>. 5. <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i>.
Sarifah Vesselina Ardani (2017) [6].	Pengaruh <i>Tenure Audit</i> , Rotasi Audit, <i>Audit Fee</i> Terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi	<p><u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Audit</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit Tenure</i> 2. Rotasi Audit 3. <i>Audit Fee</i> <p><u>Variabel Moderasi</u> Komite Audit</p>	<p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. 2. Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. 3. <i>Audit Fee</i> positif berpengaruh terhadap Kualitas Audit. <p>Komite Audit tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>Audit Tenure</i>, Rotasi Audit, dan <i>Audit Fee</i> terhadap Kualitas Audit.</p>
Sudrajat, Jouzar Farouq Ishak, Mia Sukmawati, Mutiara Nuru Syifa (2019) [18].	<i>The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, Firm Reputation and Institutional Ownership on Audit Report Lag</i>	<p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit Report Lag</i> (ARL)</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitability (ROI) 2. Leverage (DAR) 3. Firm Size 4. Firm Reputation 5. Institutional Ownership 	<p><u>Secara Parsial:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitability (ROI) has no negative effect on <i>Audit Report Lag</i>. 2. Leverage (DAR) does not have a negative effect on <i>Audit Report Lag</i>. 3. Firm Size has a negative effect on <i>Audit Report Lag</i> 4. Public Accounting Firm (KAP) Reputation has no

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
			<i>negative influence on Audit Report Lag.</i> 5. <i>Institutional Ownership does not have a negative effect on Audit Report Lag.</i>
Widijaya, Sriyana Romitha (2021) [15].	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.	<u>Variabel Dependen:</u> Kualitas Audit <u>Variabel Independen:</u> 1. Konsentrasi kepemilikan 2. Kepemilikan direktur 3. Ukuran dewan 4. Dewan direksi independent 5. <i>Leverage</i> 6. Ukuran perusahaan 7. Komite audit.	<u>Secara Parsial:</u> 1. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap Kualitas audit 2. Ukuran dewan berpengaruh positif terhadap Kualitas audit 3. Dewan direksi independent berpengaruh positif terhadap Kualitas audit 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas audit 5. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas audit 6. Komite audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas audit 7. Kepemilikan direktur tidak berpengaruh terhadap Kualitas audit
Yansen Cristian Halim (2018) [17].	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Audit Report Lag</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Audit Report Lag</i> (ARL) <u>Variabel Independen</u> 1. Profitabilitas (ROA) 2. <i>Board Size</i> 3. <i>Leverage</i> (DAR) 4. Ukuran Perusahaan 5. <i>Ownership Concentration</i>	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas (ROA), <i>Board Size</i> , <i>Leverage</i> (DAR), Ukuran perusahaan, <i>Ownership Concentration</i> berpengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> . <u>Secara Parsial:</u> 1. Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 2. <i>Board Size</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 3. <i>Leverage</i> (DAR) berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> . 5. <i>Ownership Concentration</i> berpengaruh positif terhadap <i>Audit Report Lag</i> .

2.3. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual pada penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Bedasarkan kerangka konseptual diatas, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Audit report lag*, variabel independent pada penelitian ini adalah *Audit tenure*, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan *Leverage*, sedangkan variabel intervening pada penelitian ini adalah Kualitas audit.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag* melalui Kualitas Audit

Hubungan yang telah lama terjalin antara KAP dan perusahaan cenderung membuat akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan kehilangan sikap independensinya. Hal tersebut dikarenakan sudah adanya keterikatan dekat antara pihak internal perusahaan dengan akuntan publik, yang mana juga akan mengurangi kualitas audit yang dihasilkan. Namun tidak selamanya hubungan yang terjalin lama antara KAP dan perusahaan akan membuat kualitas audit menjadi rendah, bisa juga hubungan lama yang terjalin tersebut akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi, karena semakin lama terjadinya perikatan antara KAP dan perusahaan dapat meningkatkan kompetensi auditor dalam membuat keputusan audit berdasarkan pengalaman auditor tentang kinerja perusahaan dari perusahaan dari waktu ke waktu.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit [6].

Seorang auditor yang mempunyai masa keterikatan panjang dengan perusahaan dapat lebih cepat dalam melakukan proses audit laporan keuangan, karena auditor telah mengetahui kondisi perusahaan seperti risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Sehingga, auditor akan cepat dalam menemukan solusi untuk menyelesaikannya, yang juga akan mempersingkat *audit report lag*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit report lag* [7].

Jika KAP memiliki keterikatan dalam waktu yang lama dengan perusahaan akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi, sehingga akan mengurangi jumlah waktu pelaksanaan audit, yang berarti akan memperpendek *audit report lag*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{1a}: *Audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit.

H_{1b}: *Audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*.

H_{1c}: *Audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit.

2.4.2. Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Audit Report Lag* melalui Kualitas Audit

Ukuran KAP yang besar cenderung akan mempertahankan sikap independensi dan transparansi dalam melakukan proses audit dan memberikan opini audit yang sesuai pada perusahaan. KAP besar akan melakukan proses audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, dengan begitu akan membuat kualitas audit yang dihasilkan lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang mengatakan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit [9].

Perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP besar cenderung lebih unggul dalam melaksanakan proses audit laporan keuangan, karena KAP besar mempunyai sumber daya yang lebih lengkap dan lebih efisien dalam melakukan pengauditan. KAP besar juga harus menjaga reputasi mereka dengan mempercepat proses audit yang mana akan memperpendek *audit report lag*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* [7].

Dalam melakukan proses audit, KAP besar akan mengikuti etika profesi dan menerapkan sikap kehati-hatian pada saat mengaudit laporan keuangan perusahaan, hal tersebut akan membuat kualitas audit yang dihasilkan baik. Kualitas audit yang baik menandakan tidak adanya masalah yang terjadi dalam perusahaan, sehingga akan membuat *audit report lag* menjadi lebih pendek.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{2a}: Ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.

H_{2b}: Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*.

H_{2c}: Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* melalui Kualitas Audit

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat berbagai cara untuk memastikan yaitu dengan melihat total aset yang dimiliki oleh perusahaan, total penjualan bersih yang didapat perusahaan, serta kapitalisasi pasar. Perusahaan besar akan menjaga nama baiknya pada publik dan para pemangku kepentingan dengan menyusun laporan keuangan yang sesungguhnya, yang mana hal tersebut akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi karena tidak adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit [11].

Perusahaan besar cenderung menginformasikan laporan keuangan yang telah diaudit dengan tepat waktu, karena perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal dan kinerja perusahaan yang baik sehingga akan memudahkan dalam melakukan proses audit. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar akan memperpendek *audit report lag*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag* [13].

Semakin besar ukuran suatu perusahaan cenderung memiliki kualitas audit yang tinggi, karena perusahaan akan lebih berhati-hati pada saat menyampaikan laporan keuangan, sehingga akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan akan lebih cepat, yang dapat memperpendek terjadinya *audit report lag*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{3a}: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit.

H_{3b}: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*.

H_{3c}: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit.

2.4.4. Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* melalui Kualitas Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja auditor internal dan eksternal. Pengawasan yang ketat pada auditor internal dan auditor eksternal akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang mengatakan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit [14].

Dengan adanya komite audit, dapat membantu meningkatkan pengendalian internal perusahaan dan memahami berbagai masalah keuangan dan operasional yang timbul. Maka dari itu pelaporan keuangan auditan akan lebih cepat, yang akan berdampak pada *audit report lag*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* [16].

Komite audit akan melakukan tugasnya secara optimal dalam proses audit untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yang akan mempercepat proses pelaporan keuangan auditan dan akan memperpendek *audit report lag*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{4a}: Komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

H_{4b}: Komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.

H_{4c}: Komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit.

2.4.5. Pengaruh *Leverage* terhadap *Audit Report Lag* melalui Kualitas Audit

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi akan menghadapi risiko yang tinggi pula, ini dikarenakan laba yang dihasilkan perusahaan tidak optimal, yang kemudian mempengaruhi total aset perusahaan, dan akan menghasilkan kualitas

audit yang rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang mengatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap kualitas audit [12].

Leverage yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan menghadapi keadaan keuangan yang sulit, yang mana perusahaan tidak sanggup untuk melunasi seluruh utang perusahaan, hal tersebut dikarenakan sistem manajemen yang dimiliki perusahaan sangat buruk. Tingkat *leverage* yang tinggi ini juga akan membuat *audit report lag* lebih panjang, karena auditor akan membutuhkan waktu audit yang lebih lama untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit report lag* [17].

Semakin tinggi tingkat *leverage* didalam sebuah perusahaan maka akan membuat kualitas audit dalam perusahaan semakin rendah, karena perusahaan harus lebih meningkatkan laba agar dapat melunasi seluruh utang perusahaan, hal tersebut juga akan membuat masa *audit report lag* menjadi lebih panjang.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{5a}: *Leverage* berpengaruh terhadap kualitas audit.

H_{5b}: *Leverage* berpengaruh terhadap *audit report lag*.

H_{5c}: *Leverage* berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui kualitas audit.

UNIVERSITAS
MIKROSKIL